

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA INDUK KABUPATEN CERDAS TAHUN
2019-2028 MELALUI PROGRAM SMART CITY DI KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

Karina Putri Tofani
NPP. 30.0810

*Asdaf Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: putrik618@gmail.com*

Pembimbing Skripsi : Dr. Heru Rochmansjah, S.H., M.Si

ABSTRACT

Problems/ Background (GAP): *The Blitar Regency Government has implemented one of the policies supported by advances in technology, namely the Smart City Program which aims to create smart cities in the sense of being able to create regional innovations that are innovative, effective and able to solve regional problems and manage existing potential so that become a developed and developing area. However, in its implementation there are still obstacles ranging from bureaucrats, the community, to several infrastructures and superstructures that are considered inadequate. **Purposes:** to create smart cities in the sense of being able to create regional innovations that are innovative, effective and able to solve regional problems and manage existing potential so that they become developed and developing regions. **Methods:** This study uses qualitative research methods accompanied by an inductive descriptive approach and Edward III's theory which forms the basis of the research. The data collection methods used in this research are observation, interview, and documentation methods with data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions from the implementation of the Smart City Program in Blitar Regency. **Result/Finding:** The implementation of the Smart City Program in Blitar Regency has not fully run optimally because several dimensions of Edward III's theory used by researchers in analyzing objects still find obstacles to the implementor's attitude both from the bureaucrats who are still enthusiastic about the ease of ICT progress, as well as people who still think conventionally, budget, as well as supporting facilities that affect the success of the policy. **Conclusion:** Researchers suggest that it is better to increase qualified human resources so that new, more innovative breakthroughs can be found and overcome obstacles in running the Smart City Program.*

Keyword : *Smart City, TIK, Public Service*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Kabupaten Blitar telah melaksanakan salah satu kebijakan didukung dengan kemajuan teknologi yaitu Program Smart City yang bertujuan menciptakan kota cerdas dalam arti dapat membuat inovasi daerah yang inovatif, efektif dan mampu menyelesaikan permasalahan daerah serta mengelola potensi yang ada sehingga menjadi daerah yang maju dan berkembang. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala mulai dari birokrat, masyarakat, hingga beberapa infrastruktur dan suprastruktur yang dinilai kurang memadai. **Tujuan:** menciptakan kota cerdas dalam arti dapat membuat inovasi daerah yang inovatif, efektif dan mampu menyelesaikan permasalahan daerah serta mengelola potensi yang ada sehingga menjadi daerah yang maju dan berkembang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif disertai dengan pendekatan deskriptif induktif dan teori Edward III yang menjadi landasan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari penerapan Program Smart City di Kabupaten Blitar. **Hasil/Temuan:** Implementasi Program Smart City di Kabupaten Blitar belum sepenuhnya berjalan maksimal dikarenakan beberapa dimensi dari teori Edward III yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis objek masih ditemukan hambatan pada sikap implementor baik dari pihak birokrat yang masih bereforia pada kemudahan kemajuan TIK, maupun masyarakat yang masih berpikir konvensional, anggaran, serta fasilitas pendukung yang mempengaruhi kesuksesan kebijakan. **Kesimpulan:** Berdasarkan pengamatan implementasi Program Smart City di Kabupaten Blitar sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala sehingga perlu diciptakan strategi baru dalam mengatasi masalah yang terjadi. Peneliti menyarankan baiknya untuk diadakan peningkatan SDM yang mumpuni baik dari birokrat maupun masyarakat Kabupaten Blitar agar kemudian dapat ditemukan terobosan baru yang lebih inovatif dan mengatasi kendala dalam menjalankan Program Smart City.

Kata Kunci: *Smart City*, TIK, Pelayanan Publik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari mengalami kemajuan sangat membantu manusia dalam skala besar untuk melakukan pekerjaan dengan cepat dan efisien *Information Technology* (IT) memiliki fungsi dalam mengubah, membuat, menyimpan, mengomunikasikan atau

menyebarkan informasi. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi didasari dengan kemajuan teknologi dalam sistem komputer hingga jaringan internet. Pertumbuhan internet memberi akses untuk menyebarkan informasi dan melakukan komunikasi ke berbagai pihak dengan efektif. Kebijakan terkait *e-Government* dapat membantu dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaannya. Pemerintahan daerah memiliki dasar untuk menjalankan pemerintahan dengan selayaknya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi pemberian kewenangan kepada daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan strategi untuk membangun daerah.

Pembentukan kebijakan terkait *e-Government* merupakan strategi pemerintah sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta membuat inovasi baru dengan pemanfaatan TIK untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Salah satu kebijakan yang telah dibuat pemerintah terkait *e-Government* yaitu dengan munculnya Program Smart City yang telah diterapkan pada beberapa daerah di Indonesia. Smart City merupakan salah satu konsep pengembangan kota/kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Menurut Giffinger (2007) menganggap bahwa Smart City adalah pemikiran cerdas dalam melakukan pembangunan kotanya dengan cara melihat ke depan. Dari pengertian Giffinger dapat dikatakan bahwa konsep Smart City dapat menjadikan suatu daerah menjadi lebih berkembang dengan optimal. Kabupaten Blitar termasuk dalam salah satu daerah yang terpilih untuk mengimplementasikan kebijakan Program Smart City dengan berdasarkan hasil *Assesment Gerakan Menuju 100 Smart City tahap II* yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Gerakan ini bertujuan untuk mengarahkan Kabupaten/Kota dalam menyusun *Masterplan Smart City* agar bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun mengakselerasikan potensi sumber daya baik SDM hingga SDA yang ada di masing-masing daerah. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK KABUPATEN CERDAS TAHUN 2019-2028 MELALUI PROGRAM SMART CITY DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penerapan Smart City di berbagai daerah Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan dan kelebihan. Adanya perbedaan potensi sumber daya yang beragam dari berbagai daerah dapat mempengaruhi konsep Program Smart City. Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Kabupaten Cerdas Melalui Program Smart City yang dijalankan di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur yaitu program tersebut masih memiliki kendala pada beberapa birokrat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar sebagai pelaksana implementasi kebijakan masih terpacu pada penggunaan teknologi yang memberi kemudahan pada tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga beberapa diantaranya belum konsisten dalam menjalankan tugas menciptakan inovasi dan terobosan-terobosan terbaru untuk mengatasi permasalahan daerah dan mengelola potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Blitar. Di lain sisi, masih ditemukan infrastruktur yang kurang memadai khususnya fasilitas jaringan internet.

Data Desa dengan Blank Spot di Wilayah Kabupaten Blitar

No.	Kode Wilayah (BPS)	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	3505030003	Panggungrejo	Kali Gambir
2.	3505030001	Panggungrejo	Serang
3.	3505030006	Panggungrejo	Panggung Rejo
4.	3505060014	Sutojayan	Kaulon
5.	3505040001	Wates	Ringin Rejo
6.	3505020001	Wonotirto	Tambak Rejo
7.	3505020006	Wonotirto	Ngadipuro

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, 2023

Hal ini terbukti dari masih terdapat 7 daerah blankspot yang ditemukan di daerah Kabupaten Blitar meliputi wilayah kelurahan Kali gambir, Serang, Panggungrejo, Kaulon, Ringin Rejo, Tambakrejo, dan Ngadipuro. Program Smart City merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi komunikasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah dapat dengan mudah menciptakan kesejahteraan pada masyarakat apabila seluruh masyarakat dapat dengan mudah untuk diajak bekerjasama dalam setiap kegiatan. dengan demikian, setiap program yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh keaktifan masyarakatnya sehingga dapat mencapai tujuan bersama.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam skripsi ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Kabupaten Cerdas melalui Program Smart City diantaranya adalah kajian dari Siti Wirdharetno Mursalim (2017) dengan judul “Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung” memperoleh hasil bahwasanya Implementasi Program Smart City di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung belum tersosialisasikan secara merata sehingga banyak masyarakat Kota Bandung yang belum paham mengenai Program Smart City. Dengan demikian, Walikota Bandung mengusulkan pemerintah Kota Bandung harus menjadi Smart Government dengan harapan apabila Smart Government sebagai Implementor Smart City ini berhasil, dapat dengan mudah juga menjadikan masyarakat Kota Bandung menjadi Smart People. Selanjutnya, jurnal penelitian oleh Muhammad Adrian Perdana (2019) dengan judul “Politik Pembangunan : Implementasi Smart City”. Dalam penelitiannya yang dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif memperoleh hasil bahwasanya Program Smart City belum mampu mendorong terbentuknya pola struktur kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini ditandai dengan keberadaan infrastruktur cerdas yang belum memadai karena penganggaran untuk penyelenggara program Smart City belum terpenuhi. Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah sebagai implementor berjalannya kebijakan Program Smart City belum memiliki komitmen dan pengetahuan yang kuat. Dukungan masyarakat belum tampak karena Program Smart City belum menyentuh masyarakat sekitar dan kondisi geografis di Kota Pekanbaru yang tidak mendukung. Jurnal dari Maharani Imran dan Iwan Arwana dengan judul “Optimalisasi Smart City sebagai Media Komunikasi Pembangunan di Indonesia” memperoleh hasil penelitian bahwa pemimpin daerah perlu berfokus pada pengembangan smart city yang menjadi media komunikasi interaktif dengan masyarakat untuk kesejahteraan serta Sumber daya aparat yang ada perlu ditingkatkan lagi, baik dari aspek manajerial maupun kemampuan teknis di bidang TIK, serta dukungan dan komitmen pemerintah terhadap konsep smart city.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu terletak pada lokusnya yang akan peneliti lakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Konteks penelitian yang dilakukan berfokus pada implementasinya yang menunjukkan mengenai cara dan strategi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dalam menjalankan kebijakan dan menemukan strategi serta upaya yang tepat dalam mengatasi hambatan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dari kebijakan Program Smart City. Kebanyakan

implementasi dari suatu kebijakan dapat diterapkan dengan baik namun gagal memberikan dampak yang baik pula. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan mengambil teori implementasi yang dikemukakan oleh George Charles Edward III yang diukur dengan 4 (empat) dimensi yaitu sumberdaya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Kabupaten Cerdas Melalui Program Smart City di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Smart City.

II. METODE

Penelitian skripsi yang dilaksanakan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengaktualisasikan kegiatan lapangan yaitu mengamati, melihat, menganalisa atau mengkaji permasalahan yang sedang terjadi, dengan demikian peneliti dapat terlibat aktif dalam kegiatan sehari-hari pada lokasi penelitian. Penulisan ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan induktif, karena metode yang digunakan yaitu dengan cara berfikir dan berlandaskan hal yang umum ke khusus. Pendekatan induktif dapat memberikan solusi terhadap masalah yang telah terjadi dengan menemukan fakta. Dari fakta tersebut, kemudian dapat disimpulkan suatu kesimpulan umum dari sebuah keadaan.

Sumber data yang digunakan yaitu melalui person, yaitu dasar data berupa jawaban langsung berbentuk jawaban tertulis melalui wawancara. Orang yang dimaksud dalam penelitian yang dilakukan ialah pihak yang menjadi informan atau sumber data sebab dinilai memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Person dari penelitian ini adalah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika dan masyarakat, place, yaitu dasar data berupa keadaan statis. Place dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar dan juga beberapa desa dan kelurahan, dan paper, yaitu dasar data dalam menggambarkan tanda-tanda berbentuk huruf, angka, gambar atau simbol lainnya. Paper dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penerapan Smart City Kabupaten Blitar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara semi terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan alat dan bahan penelitian berbentuk pertanyaan tertulis yang disampaikan kepada informan penelitian yang beragam. Melalui wawancara semi terstruktur, peneliti bisa menentukan permasalahan yang lebih terbuka dan luas. Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti melibatkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, Kasubid Prasarana Wilayah II pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-Gov Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Kemudian melalui observasi peneliti dapat mengetahui keadaan secara faktual dan aktual kondisi di lapangan dengan mengamati fenomena dan gejala sosial tentang implementasi permendagri yang terjadi di Kabupaten Blitar. Peneliti melaksanakan pengamatan terhadap setiap proses pemberian pelayanan yang kemudian disandingkan dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian melalui dokumentasi digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data dari informan berupa dokumen, laporan-laporan tertulis, ataupun peraturan yang berhubungan terhadap penerapan Smart City Kabupaten Blitar. Peneliti juga melakukan metode dokumentasi berupa foto, video ataupun rekaman suara tentang penerapan Smart City Kabupaten Blitar .

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam Creswell (2016:274) mengatakan “analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan gambaran terhadap data terkait penelitian, mengajukan pertanyaan analisis, serta menulis rangkuman sepanjang penelitian”. Dengan demikian, Teknik analisis data dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dengan mengelola data yang berhasil diperoleh menjadi informasi baru yang lebih mudah dimengerti sehingga berguna sebagai sarana untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan teori Edward III dikarenakan teknik analisis data berdasarkan teori ini sesuai dengan permasalahan dan keadaan di tempat penelitian yaitu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar terkait implementasi Program Smart City.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Melalui Program Smart City di Kabupaten Blitar

Penulis melakukan analisis dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan perspektif teoritis yaitu teori Implementasi dari Edward III karena teori ini menggambarkan situasi dan kondisi di dalam implementasi kebijakan dari program ini. Berdasarkan teori George Edward III yang didalamnya terdapat 4 dimensi, dimana salah satu dimensinya yaitu Sumberdaya, Komunikasi, Disposisi, Struktur Birokrasi. Adapun pembahasan dapat disimpulkan pada subbab berikut :

a) Sumber Daya, Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan suatu kebijakan yang baik. Apabila implementor dalam menjalankan kebijakan sudah baik, namun implementor kekurangan sumberdaya maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Pernyataan yang telah dijelaskan pada setiap indikator sumberdaya menurut teori dari Edward III sudah mampu membuktikan bahwa implementasi Program Smart City di Kabupaten Blitar sudah berjalan cukup baik dengan SDM pegawai yang ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing dan sudah dibentuk dewan khusus pelaksana Smart City di Kabupaten Blitar. Namun masih terdapat beberapa indikator yang dinilai masih menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan seperti sumberdaya manusia yang berasal dari masyarakat masih memiliki pikiran konvensional dan belum memiliki mindset digital. Selain itu, dari indikator fasilitas juga masih terdapat kendala ditandai dengan ditemukan beberapa kecamatan di Kabupaten Blitar yang masih tergolong daerah *blankspot* dengan jaringan yang susah diakses. Hal tersebut menjadi tugas tambahan yang harus segera diselesaikan dengan membentuk inovasi dan strategi baru yang melibatkan pihak birokrat dan masyarakat di Kabupaten Blitar agar semuanya ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan utama dari Program Smart City.

b) Komunikasi, dimensi komunikasi juga menjadi salah satu syarat keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari cara implementor mencapai tujuan yang ditransmisikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Indikator untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari implementasi suatu kebijakan dari dimensi komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsisten. Penerapan Program Smart City memerlukan proses komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam pengimplementasiannya.

Teori Edward III dengan dimensi komunikasi yang digunakan pada penelitian terkait implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 melalui Program Smart City ini memiliki kelemahan pada indikator konsistensi terlihat dari salah satu sumber wawancara yang memberikan pernyataan bahwa para implementor yang bertugas masih bereforia terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang membantu tugas para birokrat dalam memberikan pelayanan publik sehingga belum sepenuhnya memberikan solusi dan fokus pada masalah mendasar untuk menangani hambatan. Beberapa kebijakan tidak dilaksanakan secara konsisten seperti kebijakan mengurangi sampah kemasan makanan dengan cara masing-masing pribadi diwajibkan membawa tumbler sebagai wadah minuman dan tempat makan yang seiring berjalannya waktu kebijakan tersebut sudah pudar dan tidak diterapkan lagi.

c) Disposisi, disposisi atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan akan menimbulkan kendala nyata terhadap suatu implementasi apabila personil yang bersangkutan tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang aturan yang ada. Secara umum implementor harus memiliki karakteristik yang berkomitmen, berkejujuran dan bersifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Apabila implementor memiliki sikap yang bertolak belakang maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan berjalan dengan yang diharapkan.

Dalam menilai keberhasilan suatu penerapan kebijakan, apabila dilihat dari dimensi disposisi terdapat dua indikator yaitu seleksi personil dan intensif. Dimensi disposisi dalam teori Edward III pada implementasi Program Smart City di Kabupaten Blitar sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Peneliti belum menemukan adanya sikap pelaksana kebijakan yang bertindak sesuai kemauan sendiri dan penyalahgunaan jabatan sebagaimana kekhawatiran simpang siur di tengah pemikiran masyarakat. Disposisi pelaksana kebijakan di Kabupaten Blitar telah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

d) Struktur Birokrasi, struktur birokrasi yang baik adalah para birokrat yang dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan *Standart Operasional Procedure* (SOP). Dengan adanya SOP, para pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan pejabat dalam organisasi sehingga menimbulkan kesamaan dan keseragaman dalam penerapan peraturan.

Pada setiap organisasi selalu diperlukan adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) yang menjadi pedoman dalam penerapan suatu kebijakan, agar dalam pelaksanaannya tidak melenceng dari sasaran kebijakan. Penerapan *Masterplan* Program Smart City diawali dengan analisis terhadap tiga kondisi yaitu visi pembangunan daerah, kondisi daerah saat ini, dan rencana pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bitar.

Pemerintah Kabupaten Blitar ingin mewujudkan visi dan sasaran pembangunan Smart City melalui penetapan strategi pembangunan Smart City yang efektif dan efisien. Penyusunan strategi pembangunan Smart City Kabupaten Blitar tentunya telah mempertimbangkan analisis masa depan, analisis kesiapan daerah, RPJMD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan memasukkan berbagai pihak yang berkepentingan. Diantara pihak-pihak yang terlibat merupakan Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga swadaya masyarakat seperti kelas inspirasi, forum Smart City daerah dan lain-lainnya. Penyusunan strategi pembangunan Smart City ini harus dilakukan terhadap seluruh dimensi pembangunan yang meliputi Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Setelah menganalisis kondisi tersebut baru dapat disimpulkan tujuan dan tingkat kesiapan Smart City yang dilaksanakan di Kabupaten Blitar. Untuk mempercepat pembangunan menuju Blitar Smart Regency, penguatan kesiapan dan pembangunan Kabupaten Blitar dalam menjalankan Smart City harus terus diperkuat dari waktu ke waktu secara konsisten dan kompeten agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Kabupaten Cerdas melalui Program Smart City

Dalam suatu penerapan regulasi di suatu daerah tentunya menghadapi pro dan kontra dari masyarakat. Berikut penulis jelaskan masing masing faktor pendukung dan penghambat dari Pelaksanaan Program Smart City di Kabupaten Blitar

Faktor Pendukung:

- Peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Kabupaten Cerdas.
- Indikator Pembangunan Aplikasi diperkuat dengan pengembangan aplikasi, pusat operasi, tata kelola data, memperluas pembangunan jaringan.
- Indikator yang kuat dari Masterplan Smart City yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, yakni menyiapkan pembangunan Smart City

dengan meningkatkan tata kelola dengan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi dengan inovasi teknologi informasi yang terintegrasi melalui program Smart Governance.

- Pemerintah Kabupaten Blitar kuat dan matang dalam Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika telah banyak menerima penghargaan terkait kemajuan TIK seperti berhasil diraihnya Penghargaan ICT Pura yang memberikan esensi terhadap pemetaan data TIK.
- Tim pelaksana Smart City dan tim pengarah SPBE melaksanakan tugas dan fungsi secara keseluruhan dengan baik.

Faktor Penghambat:

- Beberapa birokrat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar sebagai pelaksana implementasi kebijakan masih terpacu pada penggunaan teknologi yang memberi kemudahan pada tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga beberapa diantaranya belum konsisten dalam menjalankan tugas menciptakan inovasi dan terobosan-terobosan terbaru untuk mengatasi permasalahan daerah dan mengelola potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Blitar.
- Di lain sisi, masih ditemukan infrastruktur yang kurang memadai khususnya fasilitas jaringan internet. Hal ini terbukti dari masih terdapat 7 daerah blankspot yang ditemukan di daerah Kabupaten Blitar meliputi wilayah kelurahan Kali gambir, Serang, Panggungrejo, Kaulon, Ringin Rejo, Tambakrejo, dan Ngadipuro.
- Pemerintah Kabupaten Blitar masih belum memiliki perencanaan strategis SPBE dalam ruang lingkup Rencana dan Anggaran secara jelas dan rinci khususnya dalam penerapan Program Smart City. Hal ini dikarenakan program Smart City belum memiliki regulasi dasar pada Undang-Undang Dasar. Hal ini ditunjukkan dengan belum seluruhnya daerah di Indonesia wajib menjalankan Program Smart City, melainkan hanya beberapa daerah terpilih yang dirasa mampu untuk menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini membuat belum tersedianya APBD yang secara otomatis diberikan untuk menjalankan Program Smart City.

- Pemikiran masyarakat yang masih tergolong konvensional dan belum beralih ke mindset digital sehingga banyak masyarakat khususnya masyarakat usia lanjut yang kurang pemahaman terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

3.3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Agar Semua Pihak Baik Pemerintah Maupun Masyarakat Dapat Menerapkan Program Smart City di Kabupaten Blitar

Upaya mengatasi faktor penghambat yang terjadi dalam implementasi Program Smart City dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- Melakukan Kerjasama antar Daerah
- Membentuk Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkompeten
- Melengkapi Infrastruktur Pelayanan Publik
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Mengatasi Permasalahan Daerah melalui Trobosan yang Lebih Inovatif.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dengan adanya Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Kabupaten Cerdas sebagai suatu kebijakan dengan tujuan membawa Kabupaten Blitar sebagai kota cerdas menjadi daerah yang berkembang dengan inovasi-inovasi baru dalam mengelola potensi daerah dan menyelesaikan permasalahan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penerapan Program Smart City diharapkan dapat membantu kinerja pegawai dinas untuk selalu memberikan pelayanan publik yang optimal di dukung dengan kemajuan teknologi digital.

Konsep Smart City dalam penerapannya melibatkan objek pemerintahan, masyarakat, dan infrastruktur daerah untuk tujuan mengintegrasikan informasi dari ketiga objek tersebut demi kemajuan dan pengembangan daerah, khususnya Kabupaten Blitar, dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Dalam penerapan program Smart City, pemerintah sebagai pembuat keputusan sekaligus pelaksana kebijakan tidak boleh memiliki sifat egois serta mementingkan kepentingan pribadi. Masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan juga harus ikut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan aturan dan dasar hukum yang telah ditetapkan.

Smart City bukan program yang bisa dilaksanakan hanya satu pihak. Maka dari itu, perlu terciptanya kolaborasi dan integrasi dari berbagai pihak agar Program Smart City dapat berjalan dengan terstruktur. Smart City yang merupakan program pengembangan dan kemajuan daerah harus bisa memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk mengetahui (*sensing*), memahami (*understanding*), dan mengendalikan (*controlling*) berbagai sumber daya yang terdapat di daerah khususnya Kabupaten Blitar untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Program Smart City mengimplementasikan teknologi komunikasi dan informasi secara terintegrasi dengan didasarkan kepada tiga hal yaitu, pertama faktor manusia, daerah yang di dalamnya terdapat orang-orang kreatif dan memiliki norma serta etika dalam menjalankan kaidah kehidupan sehingga menciptakan lingkungan yang bebas dari kriminal. Kedua faktor teknologi, daerah berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang baik serta didukung dengan keberadaan jaringan internet yang mudah diakses. Ketiga faktor kelembagaan, yaitu meliputi masyarakat kabupaten Blitar, pemerintah, serta kalangan bisnis yang memahami teknologi informasi serta dapat membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi. Dalam penerapannya, Bupati Blitar menetapkan dimensi Smart City meliputi *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Environment*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Branding* sebagai landasan utama dalam pelayanan dan pengembangan potensi wilayah yang ada di Kabupaten Blitar.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Peneliti juga menemukan faktor penghambat dari Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Kabupaten Cerdas Melalui Program Smart City ini yaitu para *Stakeholders* sebagai salah satu implementor kebijakan program Smart City yang masih bereforia pada kemudahan penggunaan teknologi digital yang membantu tugas dalam memberikan pelayanan publik, sehingga beberapa belum terfokus pada bagaimana menciptakan kota pintar yang mampu menyelesaikan permasalahan daerah dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki daerah dengan efektif dan efisien.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu dalam Implementasi Program Smart City di Kabupaten Blitar dilihat dari beberapa dimensi yang dikemukakan oleh Edward III bahwa pelaksanaan Program Smart City dapat dikategorikan sudah berjalan dengan baik namun tetap harus ada pembaharuan melalui inovasi terbaru yang lebih inovatif. Kemampuan tim pelaksana sudah terbentuk dengan cukup baik ditandai dengan dibentuknya Dewan Pelaksana Smart City yang berkolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar sehingga kebijakan dapat berjalan dengan

terstruktur dan lebih terarah. Kendala yang menjadi faktor penghambat pada Implementasi Program Smart City di Kabupaten Blitar dapat ditangani dengan menciptakan upaya yaitu melakukan kerjasama antar daerah sehingga masing-masing daerah dapat bertukar pikiran dan strategi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam membangun daerahnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Blitar juga berupaya membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompeten sehingga para implementor dapat menerapkan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penerapan Smart City di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PT. Pustaka Belajar.
- Giffinger, Rudolf, & Kramar, H. (2007). Benchmarking, Profiling, and Ranking of Cities : The "European Smart Cities" Approach. *In Performance Metrics for Sustainable Cities* .
- Imran, M., & Iwan, A. (2019). OPTIMALISASI SMART CITY SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*.
- Perdana, M. A. (2019). POLITIK PEMBANGUNAN : Implementasi Smart City. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah* .
- Widharetno, S. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah, Universitas Sangga Buana YKP Bandung*.
- Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Kabupaten Cerdas Tahun 2019-2028